

Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Industri Pariwisata Pada Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Serta PAD di Wilayah SARBAGITA

Muhammad Emil Ibrahim¹

Ni Luh Supadmi²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: muhammad7emil@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan industri pariwisata pada penerimaan Pajak Hotel Restoran di Wilayah SARBAGITA Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data panel tahun 2012-2019 dengan teknik analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh pada pajak hotel dan restoran, sedangkan industri pariwisata berpengaruh positif. Jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh pada PAD di wilayah SARBAGITA, industri pariwisata serta pajak hotel restoran berpengaruh positif signifikan pada PAD di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali. Pajak hotel dan restoran tidak memediasi pengaruh jumlah kunjungan wisatawan pada PAD di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali. Namun pajak hotel dan restoran memediasi pengaruh industri pariwisata pada PAD di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali.

Kata Kunci: Kunjungan Wisatawan; Industri Pariwisata; Pajak Hotel Restoran; PAD.

The Influence of Tourist Visits, Tourism Industry on Hotel, Restaurant Tax Receipts and PAD in the SARBAGITA Region

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the number of tourist visits and the tourism industry on hotel restaurant tax receipts in the SARBAGITA Region, Bali Province. The data used is panel data for 2012-2019 with path analysis techniques. The results of the analysis show that the number of tourist visits has no effect on hotel and restaurant taxes; while the tourism industry has a positive effect. The number of tourist visits has no effect on PAD in the SARBAGITA area; the tourism industry and hotel and restaurant taxes have a significant positive effect on PAD in the SARBAGITA region of Bali Province. Hotel and restaurant taxes do not mediate the effect of the number of tourist visits on PAD in the SARBAGITA area of Bali Province. However, hotel and restaurant taxes mediate the influence of the tourism industry on PAD in the SARBAGITA area of Bali Province.

Keywords: Tourist Visits; Tourism Industry; Hotel Restaurant Taxes; PAD.

Artikel dapat diakses: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 3
Denpasar, 26 Maret 2022
Hal. 818-830

DOI:
10.24843/EJA.2022.v32.i03.p20

PENGUTIPAN:

Ibrahim, M. E., & Supadmi, N. L. (2022). Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Industri Pariwisata Pada Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Serta PAD di Wilayah SARBAGITA. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(3), 818-830

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
20 Februari 2022
Artikel Diterima:
23 Maret 2022

PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah merasakan dampak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Sistem otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan mengurangi campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan ini didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (kemudian menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004) tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintah kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah harus diikuti dengan peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan harus dijalankan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan ini menjadi landasan pemerintah untuk menjamin stabilitas pertumbuhan dan pemerataan di bidang ekonomi. Desentralisasi fiskal juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan potensi untuk mengurangi kemiskinan (Miranti, R., Duncan, A., & Cassells, 2014). Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029, pada pasal 9 ayat 2 disebutkan mengenai strategi pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis yang mencakup sistem perkotaan Bali Selatan dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (SARBAGITA) yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan mendorong kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan perekonomian agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah serta Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi - potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Andriani, R. N. R., & Wahid, 2018). (Lalas, S., & Prima, 2019) mengartikan pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari pemungutan atas dasar tata tertib daerah yang berdasarkan pada susunan perundang-undangan. (Wati, M. R., & Fajar, 2017) menyatakan besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

Pendapatan Asli Daerah dapat mendukung fungsi pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang didapat dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah secara finansial harus independen terhadap pemerintah pusat yakni dengan cara menggali sebanyak-banyaknya sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya (Candrasari, A., & Ngumar, 2016). PAD Kabupaten/Kota Wilayah SARBAGITA di Provinsi Bali dari tahun 2012-2019 disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah PAD di Wilayah SARBAGITA Provinsi Bali Tahun 2012-2019 (ribu rupiah)

Tahun	Kota Denpasar	Kabupaten Badung	Kabupaten Gianyar	Kabupaten Tabanan	Jumlah
2012	511.326.621	1.870.187.279	261.222.178	183.295.007	2.826.031.085
2013	658.974.707	2.279.113.502	319.612.005	255.418.218	3.513.118.432
2014	698.739.758	2.722.625.563	424.472.546	273.426.482	4.119.264.349
2015	776.214.149	3.001.464.263	45.721.018	300.799.021	4.124.198.451
2016	807.050.192	3.563.459.640	529.864.618	318.083.799	5.218.458.249
2017	1.008.710.712	4.172.457.396	662.753.475	426.635.751	6.270.557.334
2018	940.110.335	4.555.716.407	770.204.849	363.370.469	6.629.402.060
2019	1.010.779.481	4.835.188.460	997.478.368	354.558.239	7.198.004.548

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa PAD yang diperoleh Kabupaten/Kota Wilayah SARBAGITA di Provinsi Bali dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 PAD yang diperoleh Kabupaten/Kota Wilayah SARBAGITA Provinsi Bali sebesar 2.826.031.085 triliun rupiah, kemudian pada tahun 2019 PAD diperoleh sebesar 7.198.004.548 triliun rupiah. Kabupaten Badung sebagai kabupaten di Wilayah SARBAGITA Provinsi Bali yang paling banyak memperoleh PAD setiap tahunnya, sementara kabupaten yang paling sedikit memperoleh PAD pada Wilayah SARBAGITA adalah kabupaten Gianyar (Malonza, R., & Walaba, 2016)

Sumber PAD terbesar kabupaten/kota Wilayah SARBAGITA di Provinsi Bali bersumber dari pajak daerah yaitu pajak hotel dan restoran. Pajak Hotel dan Pajak Restoran memberikan kontribusi yang nyata terhadap nilai Pajak Daerah dimana Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang berasal dari Retribusi, Bagian Laba Perusahaan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya. Pajak daerah adalah sumber pendapatan yang sangat menjanjikan bagi daerah di era otonomi daerah. Pemerintah daerah memegang peran terbesar dalam hal perpajakan, khususnya pajak daerah.

Pajak mampu berperan sebagai mediasi untuk pemerintah guna meningkatkan pendapatan daerah. Apabila jumlah kunjungan wisatawan meningkat pastinya wisatawan akan melakukan konsumsi ditempat dia melakukan wisata, seperti menginap di hotel dan makan di restoran. Dengan ditetapkannya tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebesar 10 persen, maka setiap hotel dan restoran akan memberikan 10 persen dari pendapatan atas jasa hotel dan pelayanan restoran kepada pemerintah daerah. Pajak Hotel dan Pajak Restoran memberikan kontribusi yang cukup besar bila dilihat dari komponen pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak

hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel.

Pariwisata adalah kunci keberhasilan dalam hal meningkatkan penerimaan daerah. (Anugrah, K., & Sudarmayasa, 2017) menyebutkan pariwisata berperan meningkatkan perekonomian suatu negara, baik sebagai sumber penerimaan devisa maupun penciptaan lapangan kerja. Sektor pariwisata akan membantu proses pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai sumber pendapatan daerah. Menurut (Malonza, R., & Walaba, 2016) promosi industri pariwisata merupakan strategi ampuh dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Pulau Bali merupakan barometer pariwisata dengan keindahan alam dan keunikan budayanya. Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memiliki industri pariwisata yang bervariasi, yaitu berupa perbukitan, pegunungan, persawahan dan pantai yang banyak digemari oleh wisatawan, dimana pada keberadaan objek-objek wisata tersebut, diikuti juga oleh keberadaan industri pariwisata lainnya seperti hotel dan restoran. Jumlah kunjungan wisatawan dan peningkatan pemanfaatan daerah tujuan wisata merupakan bagian penting dalam industri pariwisata. Menurut (Wirawati, N. G. P., & Putra, 2019) pariwisata memiliki dampak positif dalam pembangunan ekonomi yaitu, berdampak kepada penciptaan lapangan kerja, sumber devisa negara dan distribusi pembangunan. Menurut (Harefa, 2020), meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berperan kepada pembangunan daerah, yakni dalam pengalokasian belanja modal sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah menciptakan pelayanan publik. (Setiawan, 2016) menyatakan, jumlah kunjungan wisatawan akan dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan turut membantu dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah (Sulistianingtyas, V., Rosidi, R., & Subekti, 2018).

Sebagai destinasi pariwisata, pemerintah kabupaten/kota di provinsi Bali dan para investor telah menyediakan sarana dan prasarana pada setiap obyek wisata. Industri pariwisata khususnya hotel dan restoran berkembang di berbagai daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, seiring dengan bertambahnya kunjungan wisatawan ke Bali. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian tentang pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan industri pariwisata pada penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta pendapatan asli daerah di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Industri Pariwisata pada Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten/Kota Wilayah SARBAGITA Provinsi Bali?; Bagaimana pengaruh jumlah Kunjungan Wisatawan, Industri Pariwisata dan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada PAD di Kabupaten/Kota Wilayah SARBAGITA Provinsi Bali?; Apakah Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran memediasi Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Industri Pariwisata pada PAD Kabupaten/Kota Wilayah SARBAGITA Provinsi Bali?.

Teori Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anam & Andini, 2016) sehingga pajak sebagai kontribusi yaitu pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara atau daerah dimana hal ini akan sangat membantu pembangunan Negara,

karena dengan pajak, sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam pembangunan Negara terbantu dengan adanya pajak.

Pengertian pajak daerah dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD): Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kernakmuran rakyat. Pengertian Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapanl peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran, artinya restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, dan sejenisnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa: "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pengertian pendapatan daerah menurut penjelasan UU No.33 Tahun 2004 bahwa: "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi".

Industri pariwisata merupakan industri yang sifatnya menyerap kebutuhan tenaga orang tidak hanya mementingkan mesin-mesin saja. Beberapa usaha-usaha yang termasuk dalam industri pariwisata yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dari sektor pariwisata yaitu, hotel, rumah makan dan restoran, took souvenir dan jumlah biro perjalanan wisata (Soritua, 2017). (Swantara & Darsana, 2017) menyebutkan bahwa pengertian wisatawan nusantara, yaitu wisatawan dalam negeri atau wisatawan domestic sedangkan wisatawan mancanegara, yaitu warga negara suatu negara yang mengadakan perjalanan wisata keluar dari lingkungan negaranya dan memasuki negara lain.

Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Industri Pariwisata terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Austriana (2005) semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari pajak hotel dan restoran suatu daerah. Junior (2018) menyatakan bahwa salah satu faktor yang

secara teoritis mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran adalah jumlah wisatawan. Nuryani (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu variabel penelitian yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel adalah jumlah hotel. Ardiansyah (2005) melalui penelitiannya menemukan bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Keberadaan rumah penginapan/hotel dan restoran yang terdapat di suatu daerah akan memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, yaitu melalui penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Penelitian ini terkait dengan teori kontribusi, dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel dan restoran, keberadaan jumlah hotel dan restoran yang ada di suatu wilayah kota juga menguntungkan bagi pemerintah, apabila jumlah hotel dan restoran bertambah maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Berdasarkan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis berikut.

H₁: Jumlah kunjungan wisatawan dan industri pariwisata berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Industri Pariwisata dan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD. Menurut Windriyaningrum (2013), semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Menurut teori kontribusi, jika wisatawan banyak berkunjung, semakin besar pula pendapatan dari berbagai retribusi dan pajak yang diperoleh. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat didaerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut maka Pemerintah Daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan biaya yang besar. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut adalah Pajak Daerah. Untuk dapat membiayai pembangunan daerah, pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan cara meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dan mengingat pentingnya Pajak Hotel dan Restoran, kedua pajak tersebut dapat berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah di daerah dan sebagai sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian Dewi *et al.* (2017) dan Tirtawati (2011) menyatakan bahwa penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis seperti berikut.

H₂: Jumlah Kunjungan Wisatawan, Industri Pariwisata dan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD.

Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam memediasi Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Industri Pariwisata terhadap PAD. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.* (2017) menunjukkan bahwa jumlah

kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di kabupaten Gianyar. Koefisien regresi jumlah kunjungan wisatawan sebesar 0,902, ini berarti bahwa jika jumlah kunjungan wisatawan bertambah satu orang, maka penerimaan pajak hotel akan meningkat sebesar 902 rupiah. Nilai koefisien regresi jumlah kunjungan wisatawan sebesar 0,960 memiliki arti bahwa jika jumlah kunjungan wisatawan bertambah satu orang, maka penerimaan pajak restoran naik sebesar 960 rupiah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Junior, 2018) menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Yogyakarta. Menurut penulis berdasarkan pada data penelitian kunjungan wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2013-2016 telah mengalami kenaikan jumlah pengunjung hampir disetiap tahunnya. Tidak hanya pada jumlah kunjungan wisatawan, namun pada pendapatan asli daerah Provinsi Yogyakarta juga mengalami kenaikan hampir di setiap tahunnya selama tahun 2013-2016. Berdasarkan penelitian (Swantara & Darsana, 2017), apabila jumlah rumah penginapan bertambah maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. (Suarjana & Yintayani, 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu variabel penelitian yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran adalah jumlah hotel dan restoran itu sendiri. Ardiansyah (2005) melalui penelitiannya menemukan bahwa jumlah hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Soritua (2017) variabel industri pariwisata yang dalam hal ini variabel yang digunakan adalah variabel jumlah hotel dan restoran, hasil yang diperoleh adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Swantara & Darsana, 2017) terdapat pengaruh signifikan antara penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini juga menyimpulkan bahwa penerimaan Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis berikut.

H₃: Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran memediasi pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan industri pariwisata terhadap PAD.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Kabupaten/Kota wilayah SARBAGITA Provinsi Bali dengan menggunakan data-data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini memfokuskan kajian pada empat variabel utama yaitu jumlah kunjungan wisatawan, industri pariwisata, penerimaan PHR dan PAD di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali periode 2012-2019. Teknik analisis data yang digunakan untuk pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan bantuan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 21. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur (*path analysis*). Model persamaan model struktural dirumuskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut.

Struktur I

$$Y_1 = b_1X_1 + b_2X_2 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

Struktur II

$$Y_2 = b_3X_1 + b_4X_2 + b_5Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

Y_1 = Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Y_2 = PAD

X_1 = Jumlah kunjungan wisatawan

X_2 = Industri pariwisata

e_1 & e_2 = Standar Error

b_1 - b_5 = Koefisien jalur masing-masing variabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Industri Pariwisata Terhadap Pajak Hotel dan Restoran

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-901.591.442.370,965	283.618.982.573,807		-3,179	0,004
1 JKW	120.467,124	68.745,176	0,176	1,752	0,090
IP	1.326.702.074,105	162.729.634,911	0,817	8,153	0,000

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil analisis seperti yang disajikan pada Tabel 2, maka dapat dibuat persamaan struktural sebagai berikut.

$$\hat{Y}_1 = 0,176X_1 + 0,817X_2 + e_1$$

Tabel 2 menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0,176 dengan sig. 0,090 > 0,05 menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap PHR, sedangkan industri pariwisata dengan nilai *Standardized Coefficients* Beta sebesar 0,817 dengan sig. 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PHR.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Jumlah Kunjungan Wisatawan, Industri Pariwisata dan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	52.219.763,102	236.598.372,934		0,221	0,827
1 JKW	62,930	51,934	0,090	1,212	0,236
IP	570.655,513	212.106,783	0,345	2,690	0,012
PHR	,001	0,000	0,604	4,603	0,000

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil analisis seperti yang disajikan pada Tabel 3, maka dapat dibuat persamaan struktural sebagai berikut.

$$\hat{Y}_2 = 0,090X_1 + 0,345X_2 + 0,604X_3 + e_2$$

Hasil pengujian pada Tabel 3 menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0,090 dengan sig. yaitu 0,236 > 0,05 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap PAD. Industri pariwisata dengan

nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0,345 dengan sig. yaitu $0,012 < 0,05$ menunjukkan bahwa industri pariwisata berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh yang positif terhadap PAD, sedangkan pajak hotel dan restoran dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0,604 dengan sig. yaitu $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap PAD.

Nilai Kekeliruan Taksiran Standar. Nilai e_1 yang menunjukkan jumlah variance variabel pajak hotel dan restoran yang tidak dijelaskan oleh jumlah kunjungan wisatawan dan industri pariwisata yaitu sebesar 0,557. Nilai e_2 yang menunjukkan variance variabel PAD yang tidak dijelaskan oleh variabel jumlah kunjungan wisatawan, industri pariwisata, dan pajak hotel dan restoran yaitu sebesar 0,393. Hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 95 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 95 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 5 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Industri Pariwisata pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan hubungan positif dan tidak signifikan pengaruh jumlah kunjungan wisatawan di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali terhadap Pajak Hotel dan Restoran. Hal ini berarti jumlah kunjungan wisatawan tidak membuat penerimaan pajak hotel dan restoran yang diterima menjadi bertambah. Hal ini dapat disebabkan karena wisatawan yang berkunjung masih belum optimal dalam mengeluarkan uangnya untuk berlibur. Sedangkan Hubungan positif dan signifikan jumlah industri pariwisata (hotel dan restoran) terhadap pajak hotel dan restoran yang ada di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali berarti jumlah industri pariwisata (hotel dan restoran) mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ardiansyah, 2005), (Nuryani, 2010) dan (Sanjaya Sigit, 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Keberadaan rumah penginapan/hotel dan restoran yang terdapat di suatu daerah akan memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, yaitu melalui penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Hasil Penelitian ini mendukung teori kontribusi dimana dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel dan restoran, keberadaan jumlah hotel dan restoran yang ada di suatu wilayah kota juga menguntungkan bagi pemerintah, apabila jumlah hotel dan restoran bertambah maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Industri Pariwisata dan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan hubungan positif dan tidak signifikan jumlah kunjungan wisatawan terhadap PAD di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali. Hal ini berarti jumlah kunjungan wisatawan tidak membuat PAD yang ada di wilayah SARBAGITA menjadi meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Suarjana & Yintayani, 2018) dan juga (Widyaningsih, 2014) yang

menyatakan kunjungan wisatawan tidak berpengaruh secara langsung terhadap PAD.

Selanjutnya, hubungan positif dan signifikan jumlah industri pariwisata (hotel dan restoran) yang ada di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali terhadap PAD mempunyai arti industri pariwisata (hotel dan restoran) mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sanjaya, 2020). Pertambahan jumlah hotel setiap tahun merupakan potensi untuk menambah pendapatan asli daerah melalui pembayaran pajaknya. Di sisi lain keberadaan hotel merupakan penunjang bagi daerah untuk melaksanakan event tertentu dan ini menjadi linkage untuk berbagai sektor yang akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah secara tidak langsung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widiyanti, 2017) yang menyimpulkan bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Keberadaan restoran menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Perkembangan jumlah restoran di berbagai daerah mencerminkan dinamika perkembangan pariwisata di daerah tersebut. Semakin meningkat jumlah restoran, maka potensi peningkatan PAD juga semakin tinggi. Disamping itu, restoran juga merupakan penghubung dengan jasa lain yang berkontribusi seperti perdagangan dan transportasi dalam peningkatan PAD.

Adapun hubungan positif dan signifikan pajak hotel dan restoran terhadap PAD berarti dengan bertambahnya pajak hotel dan restoran mampu meningkatkan PAD di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari (Dewi *et al.*, 2017) dan (Tirtawati, 2011) menyatakan bahwa penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat didaerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut maka Pemerintah Daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan biaya yang besar. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut adalah Pajak Daerah. Untuk dapat membiayai pembangunan daerah, pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan cara meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dan mengingat pentingnya Pajak Hotel dan Restoran, kedua pajak tersebut dapat berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah di daerah dan sebagai sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan.

Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam memediasi Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Industri Pariwisata terhadap PAD. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap PAD melalui pajak hotel dan restoran. Hal ini berarti pajak hotel dan restoran tidak menjadi variabel mediasi antara jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan Industri pariwisata berpengaruh secara tidak langsung terhadap PAD melalui pajak hotel dan restoran. Hal ini berarti pajak hotel dan restoran dapat menjadi variabel mediasi antara industri pariwisata terhadap pendapatan hasil daerah.

Bertambahnya jumlah industri pariwisata khususnya hotel dan restoran membuat jumlah pungutan pajak ikut bertambah dan hal ini tentu meningkatkan PAD di suatu wilayah tersebut.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu Jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap terhadap pajak hotel dan restoran di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali tahun 2012-2019 dan industri pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel dan restoran di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali tahun 2012-2019. Jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap terhadap PAD di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali tahun 2012-2019 dan industri pariwisata serta pajak hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali tahun 2012-2019. Pajak hotel dan restoran tidak memediasi pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap PAD di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali tahun 2012-2019 namun pajak hotel dan restoran memediasi pengaruh industri pariwisata terhadap PAD di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali tahun 2012-2019.

Saran yang dapat diberikan bagi pemerintah daerah mengaktifkan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Mempermudah perijinan operasi restoran dan hotel baru untuk meningkatkan PAD. Bagi pengusaha hotel dan restoran disarankan untuk mematuhi regulasi yang ada terkait pemungutan dan pembayaran pajak daerah. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel penelitian yang terkait dengan perkembangan pariwisata dan memperluas populasi dan sampel penelitian.

REFERENSI

- Anam, M. C., Andini, R., & H. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening. *Journal of Accounting*.
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1(13), 30-39.
- Anugrah, K., & Sudarmayasa, I. W. (2017). Pembangunan Pariwisata Daerah Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Gorontalo. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 4(1), 33-46. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2017.v04.i02.p0>
- Ardiansyah, I. (2005). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003*. Universitas Islam Indonesia.
- Austriana, I. (2005). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata*. Fakultas Ekonomi Diponegoro.
- Candrasari, A., & Ngumar, S. (2016). Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Teningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(2), 1-22. <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/1631/1592>

- Dewi, N., Yusuf, Y., & Iyan, R. (2017). Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 870–882.
- Harefa, M. (2020). Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Belitung. 11(1), 65–77.
- Junior, R. (2018). Pengaruh Jumlah Tempat Wisata Baru, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2016. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(14), 147–157.
- Lalas, S., & Prima, N. (2019). Supervision of Hotel and Restaurant Tax (PAD) Sumedang District. *Journal of Economic Emowerment Strategy (JEES)*, 02(01), 13–23.
- Malonza, R., & Walaba, P. (2016). Effectiveness of Staff Training on the Performance of Hotels in Kisumu City, Kisumu County, Kenya. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 5(12), 2129–2133. <https://doi.org/10.21275/ART20162773>
- Miranti, R., Duncan, A., & Cassells, R. (2014). Revisiting the Impact of Consumption Growth and Inequality on Poverty in Indonesia during Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 3(50), 461–482. <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.980377>
- Nuryani. (2010). *Analisis Pajak Hotel Di Kabupaten Badung*. Universitas Indonesia.
- Sanjaya Sigit, R. A. W. (2020). Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatra Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 559–568.
- Setiawan, R. I. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 1(1), 23–35.
- Soritua, Y. (2017). Analisis Peran Sektor Pariwisata Menjadi Pendapatan Utama Daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*.
- Suarjana, A. A. G. M., & Yintayani, N. N. (2018). Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Dampaknya Pada Alokasi Biaya Modal pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 14(2), 113–124.
- Sulistianingtyas, V., Rosidi, R., & Subekti, I. (2018). A Perspective of Theory of Planned Behavior and Attribution Theory for PBB P2 Taxpayer Compliance in Probolinggo. *Journal of Accounting and Business Education*, 2(2), 320–347.
- Swantara, I. K. B. P., & Darsana, I. B. (2017). Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Pendapatan PHR, dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap PAD Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal EP Unud*, 6(12), 2551–2582.
- Tirtawati. (2011). *Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Universitas Udayana.
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi. Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76.
- Widiyanti, N. (2017). *Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015*. Repository UMY.
- Widyaningsih Putu, M. K. S. B. (2014). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan

Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal EP Unud*, 3(4), 155-163.

Windriyaningrum, L. A. (2013). *Pengaruh Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan, Dan Jumlah Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus Tahun 1981-2011*. Universitas Negeri Semarang.

Wirawati, N. G. P., & Putra, I. N. W. A. (2019). Analysis of Factors that Influence The Compliance of Tax and Restaurant Taxes in Tabanan Regency of Bali, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciens*, 2(86), 216-227.